

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Padi merupakan salah satu komoditas sereal penting di dunia dan memiliki peranan yang sangat besar dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat global. Di kawasan Asia, termasuk Indonesia, beras menjadi sumber utama karbohidrat sekaligus makanan pokok yang dikonsumsi setiap hari oleh sebagian besar penduduk. Ketergantungan masyarakat terhadap beras sangat tinggi, sehingga komoditas ini memiliki posisi yang strategis dalam mendukung ketahanan pangan. Selain itu, hampir separuh populasi dunia, khususnya yang berada di wilayah Asia, menjadikan beras sebagai bahan pangan utama dalam kehidupan sehari-hari. Tanaman padi juga telah dibudidayakan sejak lama dan hingga saat ini tetap menjadi komoditas pangan yang penting dalam menjaga ketersediaan pangan masyarakat (Fadah *et al.*, 2024).

Pembangunan sektor pertanian di Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi guna memenuhi kebutuhan pangan masyarakat serta menyediakan bahan baku bagi industri dalam negeri. Selain berperan dalam menjaga ketersediaan pangan, pembangunan pertanian juga diharapkan mampu menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani, memperluas kesempatan usaha, serta mendorong peningkatan daya saing produk pertanian di pasar ekspor. Dengan demikian, sektor pertanian memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan keberlanjutan pembangunan.

Di antara berbagai komoditas pertanian, beras memiliki posisi yang sangat strategis karena menjadi sumber pangan utama bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Keberadaan beras tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan konsumsi rumah tangga, tetapi juga berhubungan erat dengan stabilitas ketahanan pangan nasional dan kondisi ekonomi masyarakat. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk serta perubahan pola konsumsi masyarakat, kebutuhan terhadap beras sebagai bahan pangan pokok diperkirakan akan terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu.

Kondisi tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, tentang pangan yang menegaskan bahwa pembangunan sistem pangan nasional harus berlandaskan pada prinsip kedaulatan pangan dan ketahanan pangan. Kedaulatan pangan diartikan sebagai hak dan kewenangan negara dalam menentukan kebijakan pangan secara mandiri guna menjamin pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya lokal. Sementara itu, ketahanan pangan menekankan kemampuan suatu negara dalam menyediakan pangan yang cukup, aman, bermutu, dan terjangkau bagi masyarakat hingga tingkat individu secara berkelanjutan. Melalui optimalisasi potensi daerah serta pemanfaatan kearifan lokal, sistem pangan nasional diharapkan mampu berkembang secara mandiri dan berkesinambungan. Selain mendukung pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat, upaya tersebut juga berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat kemandirian bangsa dalam sektor pangan.

Secara nasional, struktur pasar gabah dan beras di Indonesia masih menunjukkan adanya ketidakefisienan dalam sistem tataniaga. Data Badan Pusat Statistik mencatat bahwa Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) beras nasional pada tahun 2019 mencapai 22,34%, sedangkan di Provinsi Sumatera Barat sebesar 12,99% (BPS Provinsi Sumatera Barat, 2021). Tingginya margin tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti besarnya biaya transportasi dari daerah sentra produksi menuju wilayah konsumsi serta struktur pasar yang cenderung oligopsonistik pada komoditas padi dan oligopolistik pada komoditas beras. Kondisi ini menyebabkan posisi tawar petani relatif lebih lemah dibandingkan pelaku tataniaga lainnya. Selain itu, lembaga perantara seperti pedagang pengumpul dan pedagang besar umumnya menanggung biaya operasional yang lebih tinggi dibandingkan pedagang pengecer. Arbi *et al.*, (2018) menyatakan bahwa besarnya biaya operasional yang harus ditanggung lembaga perantara menunjukkan masih adanya ketidakefisienan dalam rantai tataniaga beras di Indonesia. Keadaan tersebut memperlihatkan bahwa panjangnya rantai tataniaga dapat meningkatkan biaya tataniaga sehingga memengaruhi efisiensi sistem tataniaga secara keseluruhan.

Kondisi geografis Indonesia yang berupa negara kepulauan juga memperparah permasalahan tataniaga, karena jarak antarpulau yang jauh menyebabkan biaya logistik meningkat. Selain itu, ketimpangan sebaran penduduk turut memperbesar beban tataniaga: lebih dari separuh warga Indonesia menetap di Pulau Jawa, sedangkan lahan potensial untuk produksi beras justru banyak terdapat di luar pulau tersebut (Bappenas, 2013). Pariaman Timur merupakan lokasi yang strategis karena dekat dengan pusat Kota Pariaman dan Pasar Rakyat. Kedekatan wilayah ini seharusnya membeikan keuntungan dalam sistem tataniaga, seperti kemudahan akses transportasi, ketersediaan pasar, serta efisiensi tataniaga gabah dan beras dari produsen ke konsumen.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Pariaman (2025), padi (gabah kering giling) tercatat sebagai komoditas dengan produksi tertinggi dibandingkan dengan tanaman pangan lainnya. Total produksi padi dalam bentuk gabah kering giling mencapai 15.689 ton, sedangkan jagung hanya sekitar 1.021,8 ton dan singkong sekitar 300 ton (Lampiran 1). Perbedaan angka ini menunjukkan bahwa beras tetap menjadi tulang punggung sektor pertanian di Kota Pariaman. Tingginya produksi tidak hanya menunjukkan potensi besar dalam budidaya tetapi juga memengaruhi sistem perdagangan di wilayah tersebut. Semakin besar produksi beras, semakin kompleks proses tataniaga, pembentukan harga, dan mekanisme tataniaga yang harus dikelola untuk memastikan keuntungan petani tetap terjaga.

Seperti yang dijelaskan oleh Hanafie (2010), tataniaga merupakan bagian penting dari pengembangan pertanian karena berperan dalam mengatur aliran barang dari produsen ke konsumen secara efektif. Sistem tataniaga yang baik akan menentukan stabilitas harga, kelancaran tataniaga, dan besarnya keuntungan yang diterima oleh petani. Oleh karena itu, tingginya produktivitas beras di Padang Pariaman perlu diimbangi dengan perbaikan sistem tataniaga, seperti memperluas akses pasar, memperkuat organisasi petani, dan mempersingkat rantai tataniaga agar nilai ekonomi produk pertanian dapat dirasakan secara optimal oleh petani dan masyarakat setempat.

B. Rumusan Masalah

Dalam sistem tataniaga hasil pertanian, harga memiliki peranan yang sangat penting karena menjadi salah satu indikator utama dalam aktivitas ekonomi

pertanian. Menurut Mubyarto (1986), harga berfungsi sebagai penentu dalam pengalokasian sumber daya, tataniaga pendapatan, serta sebagai sarana penyampaian informasi antara produsen dan konsumen. Dalam kegiatan perdagangan hasil pertanian, harga juga mencerminkan tingkat manfaat ekonomi yang diterima petani serta menunjukkan tingkat efisiensi proses tataniaga dari produsen hingga konsumen akhir.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat (2025), rata-rata harga Gabah Kering Panen (GKP) pada November 2024 di tingkat petani mencapai Rp7.454,91/kg, sedangkan pada tingkat penggilingan sebesar Rp7.616,86/kg. Selisih harga sebesar Rp161,95/kg tersebut menunjukkan adanya margin tataniaga yang diperoleh lembaga perantara dalam proses tataniaga gabah. Meskipun nilai margin tersebut relatif kecil, perlu dilakukan kajian lebih lanjut untuk mengetahui apakah margin yang terbentuk telah mencerminkan sistem tataniaga yang efisien dan adil, terutama karena sebagian besar biaya tataniaga masih ditanggung oleh pedagang pengumpul (Lampiran 7).

Kesenjangan harga tidak hanya terjadi pada tingkat gabah, tetapi terlihat lebih nyata ketika gabah tersebut telah diolah menjadi beras. Berdasarkan hasil survei pendahuluan di Kecamatan Pariaman Timur, harga gabah yang diterima petani berkisar antara Rp7.700/Kg sampai Rp8.000/Kg, sedangkan harga beras yang dibayarkan konsumen akhir berkisar antara Rp16.500/Kg sampai Rp17.500/Kg. Selisih harga pada tahap ini jauh lebih besar dibandingkan dengan margin di tingkat gabah yang dilaporkan BPS, yang mengindikasikan bahwa sebagian besar margin tataniaga justru terbentuk pada tahap pengolahan gabah menjadi beras hingga penyalurannya ke tangan konsumen. Kondisi ini menunjukkan bahwa kajian tataniaga tidak dapat difokuskan hanya pada komoditas gabah, tetapi juga perlu mencakup komoditas beras, agar dapat diketahui pada titik mana dalam rantai tataniaga margin terbesar terbentuk serta apakah margin tersebut telah mencerminkan pembagian yang adil antara petani, pedagang perantara, dan konsumen.

Gabah dan beras dikaji secara bersamaan dalam penelitian ini karena keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam rantai tataniaga yang sama. Gabah merupakan bentuk pertama hasil panen yang dijual

oleh petani, sedangkan beras merupakan bentuk akhir gabah tersebut setelah melalui proses penjemuran dan penggilingan. Konsumen akhir pada dasarnya tidak membeli maupun mengonsumsi produk ini dalam bentuk gabah, melainkan dalam bentuk beras yang telah siap dimasak. Dengan demikian, satu rantai tataniaga yang sama sesungguhnya berawal dari petani yang menjual gabah dan berakhir pada konsumen yang membeli beras, sehingga gabah dan beras tidak dapat dipandang sebagai dua komoditas yang berdiri sendiri, melainkan dua tahap dari satu produk yang sama. Apabila kajian tataniaga hanya dibatasi pada tahap gabah, maka proses pembentukan harga, biaya, dan margin yang terjadi pada tahap pengolahan gabah menjadi beras hingga penyalurannya ke tangan konsumen tidak akan tergambarkan secara utuh. Oleh karena itu, penelusuran tataniaga dalam penelitian ini dilakukan secara berkesinambungan mulai dari petani sebagai produsen gabah hingga konsumen akhir sebagai pembeli beras.

Fluktuasi harga gabah maupun beras tidak hanya dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti kondisi cuaca, biaya produksi, dan tataniaga, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor internal yang berkaitan dengan persaingan antar pelaku tataniaga. Persaingan antara petani, tengkulak, dan pedagang besar memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap pembentukan harga gabah di tingkat petani maupun harga beras di tingkat pedagang dan konsumen. Kondisi tersebut cenderung melemahkan posisi tawar petani, terutama pada saat musim panen serentak ketika sebagian besar petani menjual hasil panennya secara bersamaan. Dalam situasi tersebut, petani sering kali berada pada posisi yang kurang menguntungkan karena harus segera menjual hasil produksi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi maupun menutupi biaya produksi.

Selain itu, keberadaan lembaga perantara, seperti pedagang pengumpul dan pedagang besar, turut memengaruhi sistem tataniaga secara keseluruhan karena pelaku tersebut memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam menentukan harga, baik harga gabah di tingkat petani maupun harga beras di tingkat konsumen, serta alur tataniaga kedua komoditas tersebut. Keadaan ini berdampak terhadap kesejahteraan petani yang pada akhirnya lebih banyak berperan sebagai penerima harga (*price taker*) dalam mekanisme pasar. Berdasarkan hasil wawancara awal dengan pihak Dinas Pertanian Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman,

diketahui bahwa sebagian besar petani padi di wilayah tersebut masih memiliki tingkat ketergantungan yang cukup tinggi terhadap tengkulak dalam kegiatan tataniaga hasil panen.

Ketergantungan tersebut semakin terlihat karena seluruh komponen biaya tataniaga, mulai dari biaya pengangkutan, penjemuran, hingga penggilingan, sepenuhnya ditanggung oleh pedagang pengumpul. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun saluran tataniaga di Kecamatan Pariaman Timur relatif pendek, masih terdapat ketimpangan dalam pembagian beban biaya dan penguasaan harga antara petani dan pedagang pengumpul. Keadaan tersebut berpotensi menempatkan petani pada posisi yang kurang menguntungkan dalam sistem tataniaga gabah dan beras sebagai produsen utama.

Penelitian yang sejalan dengan kajian ini pernah dilakukan oleh Sulaiman dan Zulkarnain (2022) yang menganalisis margin tataniaga dan farmer's share pada tiga saluran tataniaga beras di Desa Tugu Harum, Kabupaten OKU Timur. Penelitian tersebut memiliki kemiripan metodologis dengan penelitian ini, terutama dalam hal identifikasi saluran tataniaga serta perhitungan margin dan farmer's share pada masing-masing saluran. Namun demikian, kajian tersebut hanya berfokus pada beras sebagai produk akhir, tanpa menelusuri proses tataniaga sejak gabah masih berada di tingkat petani. Padahal, harga dan biaya yang terbentuk pada tahap pengolahan gabah menjadi beras turut menentukan besarnya margin yang diterima oleh masing-masing pelaku tataniaga. Di sisi lain, penelusuran pustaka juga menunjukkan bahwa kajian tataniaga gabah dan beras di Kota Pariaman sejauh ini belum pernah dilakukan; penelitian dengan tema serupa umumnya berlokasi di daerah lain di Sumatera Barat, seperti Kabupaten Solok dan Kabupaten Padang Pariaman. Dua kesenjangan inilah yang mendasari penelitian ini, yaitu perlunya kajian tataniaga yang mencakup rantai secara utuh mulai dari gabah hingga menjadi beras, sekaligus memperluas cakupan wilayah kajian ke Kota Pariaman yang selama ini belum banyak disentuh oleh penelitian sejenis.

Berdasarkan latar belakang ini, judul penelitian **"Analisis Tataniaga Gabah dan Beras di Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman"** dipilih sebagai respons terhadap pentingnya pemahaman mendalam tentang bagaimana aliran tataniaga, pembentukan margin, dan efisiensi sistem tataniaga beroperasi di

tingkat lokal. Judul ini juga mencerminkan keinginan untuk secara objektif mengkaji realitas yang dihadapi oleh petani dan pelaku pasar dalam memasarkan beras mereka.

Untuk mengatasi fokus studi ini, dua pertanyaan utama dirumuskan dalam penelitian ini:

1. Bagaimana saluran tataniaga gabah dan beras di Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman?
2. Berapa besar margin tataniaga, *farmer's share*, dan efisiensi tataniaga pada setiap saluran tataniaga gabah dan beras di Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis saluran tataniaga gabah dan beras di Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman.
2. Menganalisis margin tataniaga, *farmer's share*, dan efisiensi tataniaga pada setiap saluran tataniaga gabah dan beras di Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi peneliti mengenai sistem tataniaga gabah dan beras dari Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman. Melalui penelitian ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang peran berbagai aktor dalam saluran tataniaga.

2. Bagi petani dan pelaku usaha tataniaga

Hasil penelitian ini dapat menjadi panduan bagi petani dan pelaku bisnis dalam memahami pola perubahan harga beras dan strategi tataniaga yang lebih efektif. Dengan informasi yang diperoleh, diharapkan mereka dapat meningkatkan efisiensi dalam menjual hasil panen mereka, memperoleh harga yang lebih menguntungkan, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan mereka.

3. Bagi bidang akademis

Penelitian ini juga berkontribusi pada pengembangan ilmu agribisnis, khususnya dalam memahami sistem tataniaga gabah dan beras. Selain itu, hasil

penelitian ini dapat menjadi acuan untuk studi selanjutnya yang membahas aspek tataniaga, efisiensi tataniaga, dan kebijakan harga di sektor pertanian.

